



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
JAKARTA --- SEPTEMBER 2008**

**CONTOH SOAL DAN JAWABAN
UJIAN SERTIFIKASI
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
TINGKAT PENGENDALI TEKNIS**

MATA AJARAN

- 1. EKONOMI MAKRO**
- 2. MANAJEMEN PENGAWASAN**

**SOAL BERIKUT INI HANYA CONTOH DARI SEBAGIAN MATA AJARAN
YANG DIUJIKAN DALAM UJIAN SERTIFIKASI JFA BPKP.**

SELAMAT BELAJAR

PETUNJUK:

1. Soal terdiri dari 5 (lima) teori dan 2 (dua) kasus.
 2. Tulislah jawaban Saudara pada lembar jawaban yang telah disediakan.
-

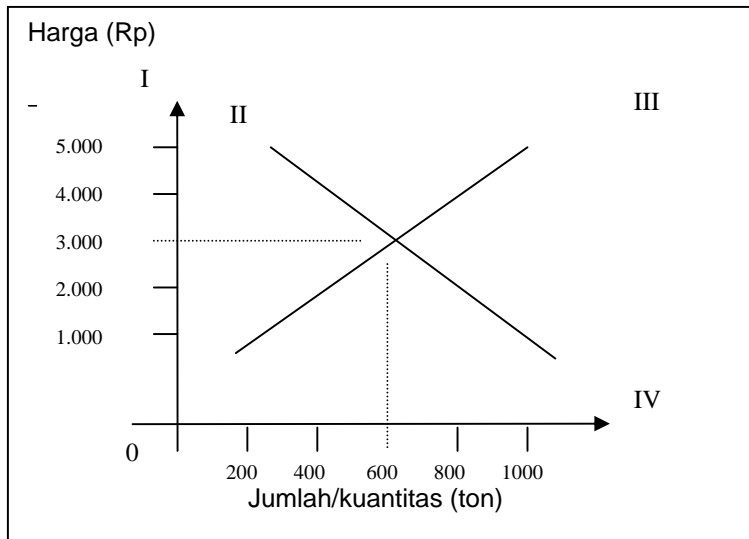
I. TEORI (Bobot 50%)

1. Sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu pelaku ekonomi harus mengembangkan alternatif dan melakukan pilihan. Sehubungan dengan hal tersebut:
 - a. Jelaskan alasan kenapa pelaku ekonomi harus mengembangkan alternatif dan melakukan pilihan.
 - b. Apa dampaknya jika pelaku ekonomi tidak terlebih dahulu mengembangkan alternatif dan melakukan pilihan
2. Sehubungan dengan terbatasnya sumber daya, pelaku ekonomi dihadapkan pada tiga permasalahan ekonomi dasar, yaitu (1) barang/jasa apa yang akan diproduksi, (2) bagaimana memproduksinya, dan (3) untuk siapa barang/jasa tersebut diproduksi. Jelaskan:
 - a. Kenapa pelaku ekonomi harus mempertanyakan barang/jasa apa dan berapa banyak yang akan diproduksi.
 - b. Siapa yang menetapkan barang/jasa apa dan berapa banyak yang akan diproduksi oleh pelaku ekonomi.
3. Secara sederhana, sistem perekonomian pasar terbentuk sebagai dampak adanya interaksi timbal-balik antara rumah tangga sebagai konsumen dan perusahaan sebagai produsen. Sehubungan dengan hal tersebut:
 - a. Gambarkan dalam sebuah chart hubungan interaksi timbal-balik antara rumah tangga sebagai konsumen dan perusahaan sebagai produsen tersebut.
 - b. Jelaskan gambar yang Saudara buat tersebut pada butir a.
4. Bagi suatu negara, penghitungan pendapatan nasional antara lain dimaksudkan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun yang mengindikasikan pertumbuhan kesejahteraan rakyatnya. Kenyataannya, terdapat beberapa kelemahan dalam konsep pendapatan nasional. Sebutkan dan uraikan beberapa kelemahan konsep pendapatan nasional tersebut.
5. Perdagangan Internasional ternyata dapat meningkatkan saling ketergantungan dan saling menguntungkan antar negara yang terkait. Hal ini dapat berlangsung karena adanya berbagai perbedaan antar negara. Sebutkan dan jelaskan berbagai perbedaan antar negara yang melatarbelakangi terjadinya Perdagangan Internasional.

II. KASUS (Bobot 50%)

Kasus 1

Di bawah ini terdapat kurva-kurva yang belum diberi nama, namun secara keseluruhan menggambarkan adanya Keseimbangan Pasar secara makro.



Sehubungan dengan gambar tersebut:

- Apa nama dan maksud dari kurva-kurva yang diwakili oleh simbol-simbol: I, II, III, dan IV
- Jelaskan di mana letak keseimbangan pasar, tunjukkan melalui angka-angka dan kurva yang ada.

Kasus 2

Di bawah ini, diasumsikan suatu tabel yang berhubungan dengan data yang bermanfaat untuk menghitung inflasi di suatu daerah.

Jenis barang	Satuan	Bobot	Harga (Rp)		Indeks Harga Konsumen	
			2006	2007	2006	2007
Beras	Kg	0,7	1.500	1.600	88	93
Daging	Kg	0,125	30.000	32.000	19	20
Tepung	Kg	0,075	4.000	4.100	12	12
Minyak goreng	Kg	0,0875	5.200	5.150	11	11
Tarip dokter	Kejadian	0,0125	50.000	56.000	3	3
Jumlah		1			132	140

Berdasarkan data tersebut:

- a. Hitunglah tingkat inflasi secara umum pada tahun 2007 di daerah tersebut.
- b. Apa yang dimaksud dengan "bobot" pada tabel di atas.
- c. Dengan menggunakan bobot tersebut, hitung besarnya rincian inflasi dari masing-masing barang bagi inflasi secara umum.

selesai

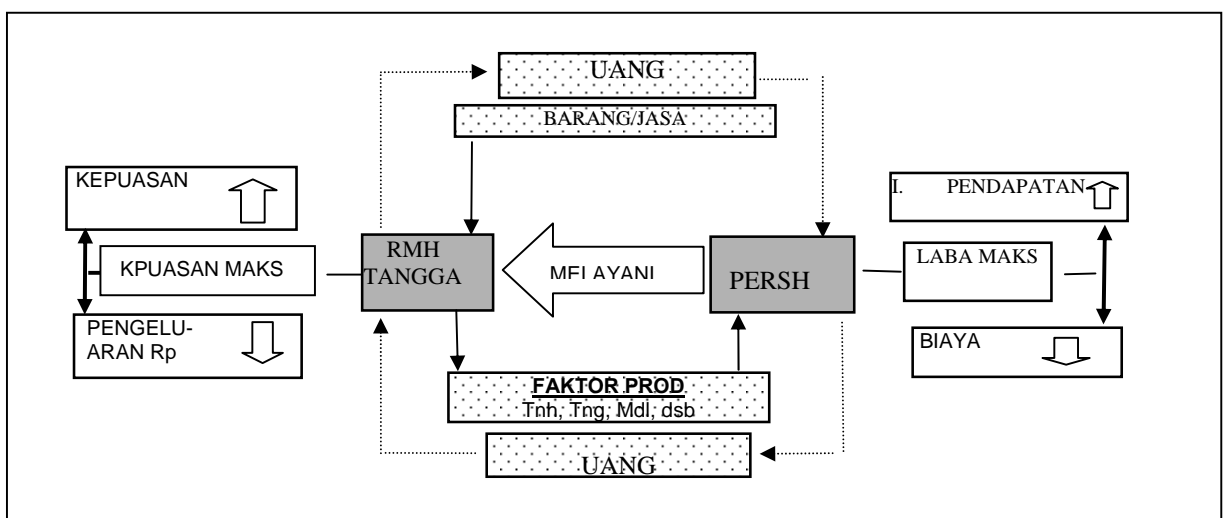
CONTOH SOAL & JAWABAN

KUNCI JAWABAN

Mata Ajaran : EKONOMI MAKRO

I. TEORI

1. a. Pelaku ekonomi harus mengembangkan alternatif dan melakukan pilihan karena sumberdaya yang ada terbatas dan dengan sumberdaya tsb ingin memaksimalkan manfaatnya. Dengan mengembangkan alternatif dapat diketahui keuntungan dan keburukan masing-masing dan sebelum mengambil kesimpulan, terlebih dahulu dipertimbangkan keuntungan dan keburukan tersebut. Alternatif yang dipilih adalah yang memberikan keuntungan maksimum dari sumberdaya yang ada.
- b. Dampaknya jika pelaku ekonomi tidak terlebih dahulu mengembangkan alternatif dan melakukan pilihan adalah, keputusan yang ditetapkan bukan keputusan yang terbaik sehingga kepuasannya tidak maksimum, yang berarti pelaku ekonomi tsb merugi.
2. a. Karena pelaku ekonomi memproduksi barang/jasa tidak untuk dikonsumsi sendiri, melainkan dijual kepada orang lain sebagai pelanggan. Tanpa mengetahui kebutuhan pelanggan, barang yang diproduksi tidak akan terjual.
- b. Barang yang akan diproduksi tidak dapat diputuskan sendiri oleh perusahaan yang akan memproduksinya, melainkan sangat ditentukan oleh jutaan pengambil keputusan yang independen, baik oleh para konsumen atau perusahaan-perusahaan yang akan memanfaatkan barang/jasa tersebut. Jika perusahaan berkeyakinan calon pemakai barang/jasa akan mau dan mampu membeli barang/jasa yang akan dihasilkannya dan memperoleh keuntungan yang diharapkan, perusahaan akan memproduksinya.
3. a. Gambar:



- b. Terdapat arus barang dan arus uang. Arus uang berasal dari perusahaan untuk membayar faktor produksi kepada rumah tangga dan selanjutnya dari rumah tangga ke perusahaan untuk membayar barang/jasa. Sedangkan arus barang berasal dari rumah tangga dalam bentuk faktor produksi (*input*) kepada perusahaan dan berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan ke rumah tangga. Sistem tersebut dapat berlangsung secara terus menerus karena kedua belah pihak, yaitu rumah tangga sebagai konsumen dan perusahaan sebagai produsen mendapatkan keuntungan. Rumah tangga memperoleh keuntungan dari kepuasan maksimal dari barang yang dikonsumsi sedangkan perusahaan memperoleh laba maksimal dari memproduksi barang.
4. Beberapa kelemahan, antara lain:
- Tidak menghitung produk-produk non transaksi
 - Tidak menghitung nilai dari waktu luang (*leisure time*)
 - Tidak memperhitungkan peningkatan mutu produk
 - Kurang memperhatikan pentingnya distribusi pendapatan
 - Kurang berorientasi ke pendapatan per kapita
 - Kurang memperhatikan kerusakan lingkungan
 - Tidak mengkalkulasikan produk-produk dari bisnis siluman
5. Perdagangan Internasional dapat terjadi karena masing-masing negara mempunyai:
- jumlah dan variasi sumber daya yang berbeda;
 - teknik-teknik produksi yang berbeda;
 - adanya perlindungan hak paten yang mampu mencegah seseorang meniru kecakapan/hasil karya orang lain;
 - hambatan-hambatan yang berbeda dalam pemanfaatan teknologi;
 - iklim yang berbeda;
 - selera yang berbeda, dan sebagainya.

Dengan adanya berbagai perbedaan tersebut, masing-masing negara melakukan spesialisasi dalam berproduksi yang hasil-hasilnya dapat dipertukarkan antar negara sehingga terjadi perdagangan internasional.

II. KASUS

Kasus 1

- a. Nama kurva I: Harga barang (price) dalam rupiah
 Nama kurva II: permintaan agregat, permintaan pasar secara total
 Nama kurva III: penawaran agregat, penawaran pasar secara total
 Nama kurva IV: Jmlah barang yang diperdagangkan, dalam ton
- b. Keseimbangan pasar terjadi pada titik persilangan antara kurva permintaan agregat penawaran agregat, yakni pada harga Rp3.000 dan jumlah barang 600 ton.

Kasus 2

Berdasarkan data tersebut:

- a. Tingkat inflasi secara umum tahun 2007 di daerah tersebut:
 $[(140 : 132) - 1] \times 100\% = 6,06\%$.
- b. Yang dimaksud dengan "bobot" pada tabel di atas adalah besarnya peran masing-masing unsur yang diperhitungkan dalam menghitung inflasi. Dari tabel tsb diketahui bahwa beras mempunyai bobot atau menyumbangkan 0,7 atau 70% dari inflasi secara keseluruhan.

c.

Jenis Barang	Bobot	Sumbangan Inflasi (%)
Beras	0,7	$0,7 \times 6,06\% = 4,24\%$
Daging	0,125	$0,125 \times 6,06\% = 0,76\%$
Tepung	0,075	$0,075 \times 6,06\% = 0,45\%$
Minyak goreng	0,0875	$0,0875 \times 6,06\% = 0,53\%$
Tarip dokter	0,0125	$0,0125 \times 6,06\% = 0,08\%$
Jumlah	1	6,06%

(Modul hal 51)

PETUNJUK:

1. Soal terdiri dari 5 (lima) teori dan 2 (dua) kasus.
 2. Tulislah jawaban Saudara pada lembar jawaban yang telah disediakan.
-

I. TEORI (Bobot 50%)

1. Salah satu pemikiran dasar dari audit pada sektor pemerintah adalah mandat audit. Mandat audit adalah pendelegasian kewenangan yang dituangkan dalam tugas pokok dan fungsi kepada Aparat Pengawasan guna melaksanakan tugas pengawasannya secara efektif.
Jelaskan menurut Saudara seberapa besar peranan mandat audit terhadap aparat pengawasan dikaitkan dengan efektivitas pelaksanaan tugas APIP.
2. Perencanaan yang baik akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan suatu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Jelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perencanaan membawa manfaat yang berarti.
3. Sumber daya manusia auditor adalah tulang punggung keberhasilan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Oleh karena itu, tersedianya staf auditor yang memiliki kapasitas dan kompetensi audit merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar.
Saudara diminta menguraikan kegiatan yang harus dilakukan oleh manajemen APIP dalam perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia auditor.
4. Dalam tahapan pelaksanaan penugasan audit diperlukan adanya kebijakan dan prosedur tertulis yang menjadi pedoman bagi manajemen dan auditor APIP. Kebijakan dan prosedur meliputi: tujuan, kewenangan, tanggungjawab, struktur organisasi, administrasi, uraian tugas dan sebagainya.
Saudara diminta untuk merancang suatu kebijakan dan prosedur dalam penetapan auditor yang akan ditugaskan dalam suatu penugasan audit.
5. Standar audit aparat pengawasan fungsional pemerintah menyatakan bahwa: *"Auditor harus melakukan pengujian atas ketaatan auditan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pengujian atas kemungkinan adanya kekeliruan, ketidakwajaran serta tindakan melawan hukum"*.
Jelaskan hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang auditor agar supaya ia dapat menilai ketaatan obyek pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan.

II. KASUS (Bobot 50%)

Kasus 1

Drs. Bambang Sanjaya, Inspektur pada Inspektorat Jenderal Departemen Komunikasi dan Informasi menerima perintah dari atasannya untuk merencanakan pelaksanaan audit operasional pada kegiatan pengadaan perangkat keras (*hardware*) teknologi informasi tahun 2007 berupa peralatan server, jaringan, komputer personal dan peralatan pendukung lainnya guna membangun jaringan *wide area network* dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Informasi yang tersedia untuk kegiatan audit tersebut:

1. Waktu audit 10 hari kerja
2. Biaya audit, terdiri dari:
 - a. Transpor dalam kota Rp 50.000,00 per orang/hari
 - b. Transpor luar kota dan biaya akomodasi Rp 500.000,00 per orang/hari
3. Staf auditor yang tersedia: 4 orang
4. Pelaksanaan audit akan dimulai pada minggu pertama bulan Februari 2008.
5. Pelaksanaan audit akan dilakukan selama 5 hari kerja di dalam kota dan 5 hari di luar kota.

Diminta:

Saudara diminta oleh Drs. Bambang Sanjaya untuk membantu beliau menyediakan informasi yang harus dimuat dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan berdasarkan informasi di atas.

Kasus 2

Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Nusa Dua memiliki komitmen yang tinggi atas upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan yang kemudian ditegaskan kembali oleh Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Hasil audit atas beberapa proyek pengadaan barang dan jasa di Propinsi Nusa Dua mengungkapkan adanya indikasi yang kuat terhadap adanya tindakan melawan hukum yang mengarah kepada terjadinya kerugian negara/daerah.

Beberapa titik kritis yang disinyalir terjadi pada hasil audit meliputi:

- 1) Pengadaan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan, baik segi jumlah, kualitas dan waktu.
- 2) Prosedur pengadaan barang/jasa yang digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa banyak yang tidak dipenuhi.

- 3) Kuantitas, kualitas dan harga barang/jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak serta diserahkan melampaui waktu yang telah ditetapkan.
- 4) Barang yang diperoleh tidak ditempatkan di lokasi yang tepat, tidak dipertanggungjawabkan dengan benar, dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- 5) Terdapat beberapa kelemahan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa.

Diminta:

Saudara diminta bantuannya oleh Kepala Bawasda untuk merancang kebijakan dan prosedur penyelesaian hukum dengan aparat hukum dalam lingkungan Bawasda Propinsi Nusa Dua untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

selesai

KUNCI JAWABAN

Mata Ajaran : **MANAJEMEN PENGAWASAN**

II. TEORI

1. *Pemberian mandat untuk melaksanakan pengawasan merupakan kunci efektivitas pelaksanaan tugas aparat pengawasan internal pemerintah. Karena melalui mandat itulah APIP memiliki kewenangan untuk mengakses semua informasi tanpa kecuali dan melakukan audit atasnya tanpa ada pembatasan sama sekali. Dengan mandat itulah APIP memiliki kebebasan untuk menyatakan temuan hasil auditnya secara obyektif. Dengan demikian APIP diharapkan dapat mempertahankan sikap independensinya dalam melaksanakan penugasan auditnya. Dalam mandat itu juga harus ditentukan secara jelas kedudukan organisatoris struktural APIP di lingkungan organisasi/instansi yang bersangkutan dan kepada siapa APIP harus menyampaikan akuntabilitasnya. Semakin tinggi kedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada pimpinan instansi semakin bebaslah APIP untuk melaksanakan tugasnya secara efektif (halaman 5).*
2. (Halaman 16) Perencanaan akan bermanfaat, apabila memenuhi persyaratan sbb:
 - a. Perencanaan merupakan penjabaran dari tujuan pokok organisasi;
 - b. unsur pimpinan dan bawahan dilibatkan dalam proses perencanaan;
 - c. Rencana dibuat serealistis mungkin;
 - d. Rencana disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi;
 - e. Rencana harus dikomunikasikan dan dapat dimengerti dengan mudah;
 - f. Rencana digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - g. Keberhasilan rencana dapat diukur;
 - h. Rencana tetap mengandung keluwesan.
3. (Halaman 24) *Mengingat sumber daya manusia auditor merupakan faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan penugasan APIP, maka manajemen APIP harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini dalam perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia auditor, yaitu antara lain:*
 - *Menyiapkan uraian tugas tertulis bagi para auditor setiap jenjangnya masing-masing.*
 - *Melakukan perekrutan dan pemilihan SDM auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai, misalnya antara lain dengan melakukan tes psikologi untuk menilai bakat, tes substansi audit, dan tes pengetahuan dan keterampilan pendukung lainnya, seperti: bahasa Inggris, kepemimpinan dan sebagainya*
 - *Memberikan pelatihan dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan mewajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi yang berkelanjutan.*

- Melakukan evaluasi kinerja auditor sebagai dasar pemberian penugasan dan insentif.
 - Melakukan konsultasi kepada staf auditor atas kinerja mereka dan memberikan dorongan serta motivasi untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kapasitas auditor.
4. (Halaman 30-31) Pimpinan audit internal harus membuat berbagai kebijakan dan prosedur secara tertulis sebagai pedoman bagi staf auditor.

Kegiatan Penetapan Auditor yang akan ditugaskan
Kebijakan:

Auditor yang ditunjuk adalah seorang auditor independen dan memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan bidang yang akan ditugaskan kepadanya.

Prosedur:

- a. *Rancang sistem personel yang memuat nama-nama auditor berikut kualifikasi dan kompetensi bidang masing-masing.*
 - b. *Lakukan pengkajian dan penilaian tingkat kesulitan dan risiko dari bidang yang akan diaudit.*
 - c. *Hasil pengkajian dibandingkan dengan personel auditor sesuai dengan kualifikasi dan kapasitasnya.*
 - d. *Lakukan pengujian independensi auditor dimaksud dengan cara wawancara dan menandatangani surat pernyataan independen atas obyek pengawasan yang akan diauditnya.*
5. (Halaman 36-37) Hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang auditor agar supaya ia dapat menilai ketaatan obyek pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:
- *Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - *Menilai bahwa peraturan yang telah diterapkan tidak bertentangan dengan peraturan yang setingkat atau lebih tinggi;*
 - *Menilai bahwa, dalam pelaksanaannya, peraturan tersebut tidak mengandung hal-hal yang dapat menimbulkan hambatan.*

II. KASUS

Kasus 1

No	Identitas Audit	Anggaran Biaya	Sasaran Audit	Periode Audit	Jumlah Auditor	Rencana Mulai Audit	Rencana Penerbitan Laporan
1.	Pengadaan Perangkat Keras Teknologi Informasi	Rp 11 jt	Audit Operasional	2007	4	Minggu I Feb 2008	Minggu III Feb 2008

Anggaran biaya audit:

- a. Biaya transpor dalam kota =
 $5 \text{ hari} \times 4 \text{ orang} \times \text{Rp } 50.000 = \text{Rp } 1.000.000,00$
 - b. Biaya transpor luar kota =
 $5 \text{ hari} \times 4 \text{ orang} \times \text{Rp } 500.000 = \text{Rp } 10.000.000,00$
- Total biaya audit Rp 11.000.000,00

Kasus 2

Standar tindak lanjut dari Standar Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah butir ke empat berbunyi: "Terhadap temuan yang berindikasi adanya tindakan melawan hukum, APFP harus membantu aparat hukum terkait dalam upaya penindaklanjutan temuan tersebut". Dengan demikian, maka adalah merupakan kewajiban APIP untuk membantu penyelesaian hasil audit yang memerlukan penyelesaian hukum dengan membantu aparat penegak hukum.

Kebijakan dan prosedur yang patut dirancang oleh Bawasda Propinsi Nusa Dua adalah:

Kebijakan:

APIP membantu Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan pihak lainnya) secara optimal atas semua hasil auditnya yang memberikan indikasi adanya pelanggaran hukum yang mengarah kepada kerugian negara/daerah.

Prosedur:

1. Menjalinkan hubungan kerjasama dengan pihak penegak hukum melalui penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) sebagai payung hukum kerjasama tersebut.
2. Melakukan rapat konsultasi pengawasan secara periodik dengan aparat penegak hukum berkenaan dengan hasil pengawasan yang berindikasi adanya tindakan melawan hukum.
3. Pemaparan modus operandi dari hasil pengawasan yang dijumpai oleh APIP di hadapan pihak penegak hukum untuk menentukan kelayakan penindaklanjutan kasus ke proses penyelidikan atau penyidikan oleh aparat penegak hukum.
4. Memberikan bantuan staf auditor untuk menghitung kerugian negara apabila diminta oleh pihak penegak hukum.